

BAB II

POPULASI TENAGA KERJA JEPANG

2.1 Perkembangan Perekonomian Jepang Pasca PD II

Jepang merupakan negara maju dengan tingkat perekonomian yang cukup baik. Perekonomian merupakan salah satu penunjang majunya negara Jepang. Sejak kehancuran PD II, Jepang dikenal dengan “*Japanese Miracle*” dengan kekuatan perekonomiannya yang tak tertandingi hingga tahun 1980-an. Kejayaan perekonomian Jepang tersebut didukung oleh besarnya peran pemerintah dalam pembangunan ekonominya. Namun memasuki awal dekade 1990-an, Jepang mulai mengalami kemerosotan ekonomi yang ditandai dengan ambruknya perekonomian yang mengantarkan Jepang memasuki masa krisis ekonomi yang berkepanjangan (Sagena, 2005: 57).

Seperti yang dikatakan oleh PM Jepang Nakasone pada tahun 1980-an, “*Having ‘caught up’ (with the Western nation), we must now expect others to try to catch up with us. We must seek out a new path for ourselves and open it up ourselves*” bahwa pada dekade tersebut Jepang merupakan model keberhasilan ekonomi yang tidak tertandingi. Selama dua periode krisis minyak tahun 1970-an sampai 1980-an, Jepang tampil sebagai satu-satunya negara industri yang mengalami pemulihan ekonomi paling cepat dibandingkan Amerika Serikat dan Eropa. Jepang mengantungi surplus perdagangan terbesar di antara negara maju lainnya. Jepang juga menjadi pemimpin dalam persaingan teknologi dan ekonomi dengan negara-negara maju lainnya. Seperti apa yang dikutip di atas, PM Jepang Nakasone merasa bahwa Jepang akan menjadi pemimpin ekonomi sekaligus memberikan model pembangunan ekonomi yang berbeda dengan tradisi Barat. Namun demikian, harapan Jepang itu saat ini menjadi berantakan. Sistem ekonomi Jepang pada tahun 1980-an ternyata hanya merupakan *bubble*, yang mulai *gembos* sejak awal dekade 1990-an. Sistem ekonomi yang diharapkan

menjadi model, ternyata mengandung banyak kelemahan yaitu keroposnya sistem perbankan dan finansial yang membuat satu per satu perusahaan keuangan dan bank di Jepang akhirnya bangkrut, tingkat kredit macet yang tinggi, pertumbuhan ekonomi nasional negatif pada tahun 1990-an, serta tingkat pengangguran yang semakin tinggi hingga mencapai rekor 4,8% pada awal tahun 1999. Kemudian didukung dengan lambatnya pemerintah Jepang dalam mengatasi krisis ekonomi ini, sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah ekonomi Jepang, sebuah krisis ekonomi berlangsung selama 8 tahun lamanya tanpa penyelesaian (Mugasejati, 1999: 40-41).

Saat itu, kondisi perekonomian Jepang berada di posisi stagnan, meskipun kondisi perekonomian Jepang saat itu sudah diperbaiki dalam kurun waktu yang berbeda. Fenomena krisis ekonomi berkepanjangan ini disebut "*the lost 20 years*". Selama era itu, Jepang mengalami deflasi berkepanjangan, dan selama dekade tersebut struktural tenaga kerja mengalami perubahan, salah satunya yaitu, tingkat pekerja pada laki-laki usia 25-34, 35-44, 45-54 mengalami penurunan, hal ini disebut dengan *employment ice age*. Kemudian sekitar tahun 1993 – 2005, banyak para pencari kerja yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang mereka inginkan, sehingga mereka meninggalkan dunia pekerjaan begitu saja (Labor Situation in Japan and its Analysis, 2016).

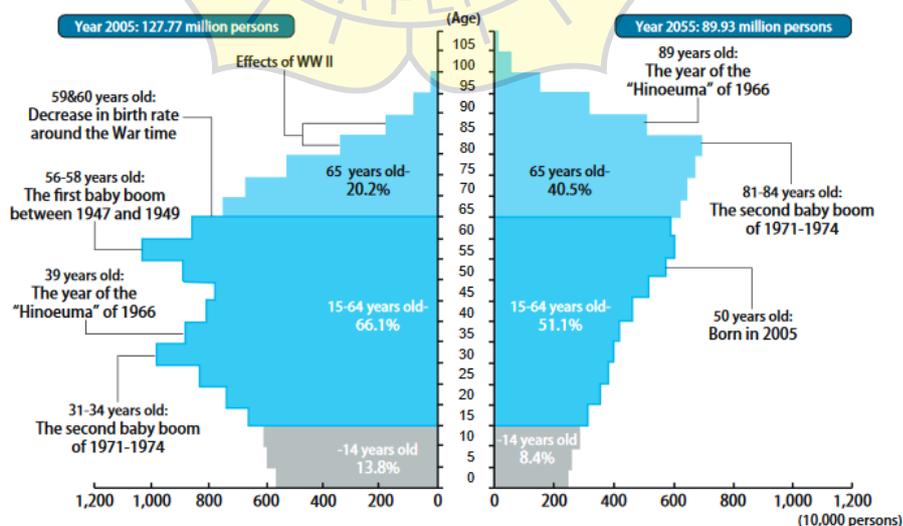
Dengan kemerosotan perekonomian Jepang tersebut, penurunan serta penuaan populasi juga merupakan salah satu alasan pendukungnya. Sejak pertengahan 1990-an, perekonomian Jepang telah menghadapi masalah penurunan populasi tenaga kerja. Total populasi mulai menurun pada tahun 2010-an, tetapi populasi tenaga kerja usia produktif (15-64), yang merupakan sumber utama pasokan tenaga kerja, sudah mulai berkurang pada pertengahan 1990-an. Dengan menurunnya populasi tenaga kerja usia produktif dan meningkatnya populasi menua mempengaruhi penurunan tingkat pertumbuhan per kapita yang dapat memberikan tekanan ke bawah pada pertumbuhan ekonomi, sehingga penurunan tenaga kerja

serta peningkatan populasi menua sangat mempengaruhi perekonomian Jepang (Wakatabe, 2019: 1-2).

2.2 Gambaran Populasi Masyarakat di Jepang

Awalnya setelah PD II populasi masyarakat Jepang meningkat sekitar 1,76% yaitu pada angka 72,15 juta sampai angka 127,08 juta. Saat itu Jepang berada pada angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Kemudian setelah fenomena *baby boom* pertama atau fenomena angka kelahiran berada pada skala yang tinggi, populasi Jepang menurun 1% setiap tahunnya selama 10 tahun, kemudian setelah fenomena *baby boom* kedua pada tahun 1970-an mengalami penurunan kembali hingga angka 1,7% setiap tahunnya. Hingga menjelang akhir tahun 1990-an, presentase populasi yang awalnya pada usia 14 atau usia muda 18,2%, populasi usia kerja (usia 15-64) berada pada 69,7%, dan populasi di atas usia 65 ialah 12,1%, diproyeksikan pada 2030 akan berada pada angka 10,3%, 58,1%, dan 30,1% (Labor Situation and its Analysis, 2016), seperti grafik populasi Jepang di bawah ini.

Grafik 2.1 Populasi Jepang dalam 50 Tahun



Sumber: *Labor Situation in Japan and its Analysis: General Overview 2015/2016*

Grafik populasi di atas menjelaskan bahwa gambaran pada 50 tahun mendatang dari tahun 2005 sampai tahun 2055 populasi usia muda dan populasi usia kerja akan mengalami penurunan, sedangkan populasi usia tua akan mengalami peningkatan. Jepang merupakan salah satu negara dengan populasi menua yang cukup banyak. Grafik di atas juga menjelaskan bahwa gambaran atas 50 tahun yang akan datang untuk kelompok usia 65 tahun ke atas akan mengalami kenaikan, yaitu dari angka presentase 20,2% menjadi 40,4%.

Dengan semakin meningkatnya jumlah populasi menua atau 65 tahun ke atas, maka tingkat kematian akan menjadi tinggi, di sisi lain tingkat kelahiran di Jepang sangatlah rendah. Hal ini sangat mempengaruhi jumlah populasi tenaga kerja usia produktif yang akan terus menurun setiap tahunnya. Penurunan maupun peningkatan populasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kondisi demografi Jepang.

2.2.1 Kondisi Demografi Jepang Pasca PD II

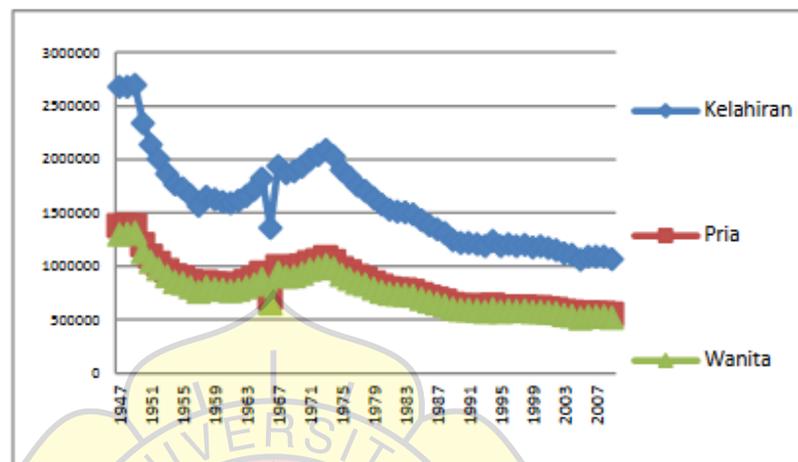
Pasca PD II jumlah kelahiran di Jepang mengalami pasang surut, sejak tahun 1975 angka tersebut terus mengalami penurunan sampai saat ini dan diperkirakan jumlahnya akan terus menurun. Sementara, tersedianya sumber daya manusia sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan populasi, khususnya jumlah usia produktif yang berfungsi sebagai pengganti generasi sebelumnya. Dalam beberapa dekade terakhir, Jepang dihadapi pada masalah yang berhubungan dengan kondisi demografi. Hal tersebut disebabkan karena terus terjadinya penurunan angka kelahiran dan pesatnya pertumbuhan populasi lansia (Ochiai (1997) dalam Widiandari, 2016: 32).

Menurut *The Japan Labour Institute for Labor Policy and Training 2016*, tingkat kelahiran (jumlah kelahiran per satu orang wanita) pada tahun 1975 adalah 2, kemudian pada tahun 2005 menurun drastis menjadi 1,26. Setelah itu pada tahun 2014 melambung kembali pada angka 1,42, tetapi untuk tahun selanjutnya akan mengalami penurunan terus menerus. Seperti jumlah populasi Jepang pada tahun 2008 yang mencapai puncaknya yaitu

128,08 juta orang dan mulai mengalami penurunan, hingga tahun 2030 populasi Jepang akan mengalami kejatuhan hingga angka 116,62 juta orang.

Seperti grafik di bawah ini yang menjelaskan jumlah kelahiran Jepang pada tahun 1947 – 2007.

Grafik 2.2 Jumlah Kelahiran di Jepang (1947 – 2007)



Sumber: National Institute of Population and Social Security Research

Grafik di atas memperlihatkan perkembangan jumlah kelahiran di Jepang yang mengalami kenaikan dan penurunan. Awalnya pada tahun 1947-1949 Jepang mengalami fenomena *baby boom* pertama. Namun setelah PD II tepatnya setelah tahun 1949 jumlah kelahiran mengalami penurunan dengan alasan kualitas hidup yang meningkat. *Baby boom* kemudian muncul kembali pada tahun 1971-1974, pada masa ini masyarakat Jepang berada di puncak kemakmuran. Kemudian sejak tahun 1974 jumlah kelahiran mengalami penurunan hingga saat ini, alasan penurunan tersebut berkaitan dengan perubahan gaya hidup.

Perubahan gaya hidup di Jepang serta didukung dengan biaya hidup yang relatif semakin meningkat membuat warga Jepang memprioritaskan kehidupan pribadinya seperti salah satunya fokus terhadap karir yang mereka jalani. Penduduk Jepang memiliki etos kerja yang cukup tinggi, salah satunya adalah sifat pekerja keras. Dengan etos kerja yang mereka miliki, mereka memilih untuk mementingkan kebutuhan hidup mereka

sendiri dengan cara bekerja keras seumur hidup, sehingga mereka tidak memiliki cukup waktu luang untuk memikirkan hal lain selain bekerja. Akibatnya tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk menunda pernikahan bahkan ada juga yang memilih untuk tidak menikah.

Seperti halnya populasi tenaga kerja wanita yang mengalami peningkatan, karena wanita mulai menyetarakan posisi kedudukan seperti kaum laki-laki pada umumnya atau dinamakan sebagai emansipasi wanita, dimana wanita Jepang pada zaman modern ini tidak sedikit yang telah mengenyam pendidikan tinggi untuk dapat bekerja di perusahaan-perusahaan ternama, disisi lain banyaknya paham-paham feminisme yang sudah merajalela di lingkungan masyarakat yang mengusung peranan wanita dalam dunia tenaga kerja. Hal tersebut tentunya juga mendorong kaum wanita masuk ke pasar tenaga kerja, (Handayani dan Salim, 2011: 146). Oleh sebab itu, tidak sedikit perempuan Jepang yang menunda usia pernikahan, bahkan mereka juga menunda kelahiran sampai usia produktif. Hal ini sangat berpengaruh terhadap angka kelahiran Jepang.

Seperti dalam beberapa penelitian, pernikahan sering disebut sebagai faktor utama yang menentukan jumlah kelahiran, diantaranya adalah meningkatnya fenomena *bankonka* atau fenomena penundaan pernikahan dan jumlah populasi dari orang yang tidak menikah (Ogawa (2003) dalam Widiandari, 2016: 33).

Di satu sisi bila tingkat kelahiran tidak meningkat, seluruh penduduk Jepang akan mulai menurun lebih dari 1 persen per tahun, yang dapat berpotensi pada penurunan *populasi tenaga kerja usia produktif* di masa yang akan datang. Hal ini menjadi pemicu terjadinya ketidakstabilan terhadap masa depan pertumbuhan perekonomian dan sosial di Jepang (Handayani dan Salim, 2011: 145-146).

Selain itu, tingkat kematian yang tinggi juga merupakan pemicu terhadap penurunan populasi Jepang. Menurut data pemerintahan Jepang, tingkat kematian Jepang pada tahun 1950 – 1980 mengalami penurunan secara signifikan setiap tahunnya, namun setelah itu sejak tahun 1980 – saat

ini, angka tingkat kematian melambung kembali setiap tahunnya. Dengan peningkatan angka kematian yang terus menerus hingga saat ini, sangat berdampak pada semakin berkurangnya populasi masyarakat Jepang. Dengan demikian, tingginya tingkat kematian dan rendahnya tingkat kelahiran sangat mempengaruhi kondisi populasi masyarakat Jepang.

2.3 Gambaran Umum Populasi Tenaga Kerja di Jepang

Populasi tenaga kerja ialah populasi tenaga kerja terhadap populasi umum yang dimulai dari usia 15 tahun ke atas, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Jepang “*Labor Standart Act (1947)*” Chapter VI pasal 56 yang mengatur tentang minimal usia kerja; *Article 56*.

最低年齢 (*Minimum Age*);

第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

(1) An employer shall not employ children until the end of the first 31st of March that occurs on or after the day when they reach the age of 15 years.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa warga yang berusia di bawah 15 tahun tidak diperkenankan untuk bekerja, rentang usia populasi tenaga kerja Jepang adalah 15-64 tahun.

Populasi tenaga kerja merupakan salah satu penunjang pertumbuhan perekonomian suatu negara, begitu juga Jepang. Dengan adanya populasi tenaga kerja yang memadai serta dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang baik maka laju pendapatan per kapita negara tersebut dalam kondisi yang baik.

Di sisi lain, Jepang saat ini sedang dilanda fenomena kekurangan populasi tenaga kerja usia produktif. Kekurangan populasi tenaga kerja usia produktif terjadi karena beberapa faktor pendukung salah satunya adalah perubahan pada kondisi demografi Jepang, yaitu berupa penurunan serta penyusutan jumlah populasi penduduk di Jepang yang diakibatkan dari

rendahnya tingkat kelahiran serta rendahnya tingkat kematian atau harapan hidup yang tinggi.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*), Jepang memiliki angka harapan hidup yang tinggi jika dibandingkan dengan negara lain, 85 tahun untuk pria dan 87,3 tahun untuk wanita. Selain itu Jepang juga memiliki rasio *centenarian* (*populasi usia di atas 100 tahun*) tertinggi di dunia, lebih dari 520 untuk setiap juta orang (Garcia & Miralles, 2018: 135).

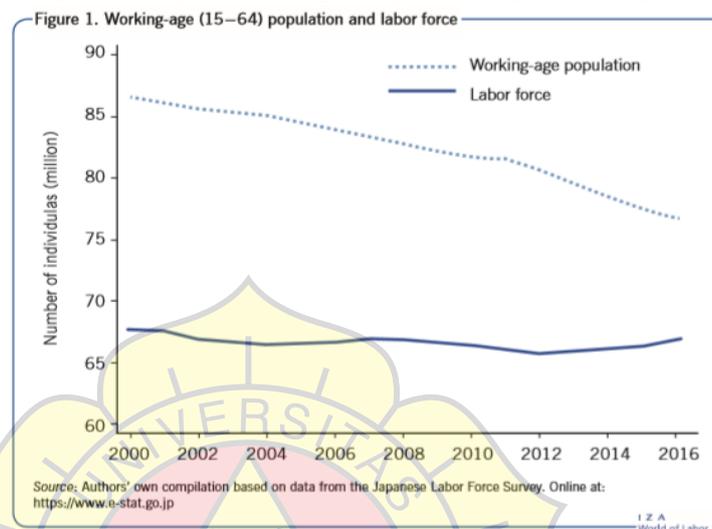
Dengan tingkat harapan hidup yang tinggi maka berpotensi pada terus bertambahnya jumlah populasi menua (65 ke atas) dalam beberapa tahun yang akan datang. Seperti bentuk piramida penduduk Jepang yang berawal pada piramida jenis piramida stationer (granat), yaitu dengan jumlah penduduk usia muda dan usia tua dalam jumlah yang merata, namun jika diproyeksikan dengan meningkatnya jumlah usia menua serta rendahnya usia kelahiran, maka di masa yang akan datang piramida penduduk Jepang akan mengarah pada piramida penduduk tua (*constructive*) dimana piramida tersebut berbentuk semakin besar ke atas karena jumlah usia tua dalam skala yang lebih besar dibandingkan jumlah usia muda atau usia produktif.

Menurut *Ministry of Internal Affairs and Communications 2014*, pada tahun 1960 jumlah populasi pekerja Jepang adalah 45,11 juta jiwa, namun mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 65,87 juta jiwa. Sedangkan, di sisi lain populasi usia tenaga kerja produktif Jepang tahun 1960 berada pada presentase 69,2%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 59,4% (*Labour Situation in Japan and its Analysis, 2016*).

Dimulai dari pertengahan tahun 1990-an, Jepang mengalami penurunan pada populasi usia tenaga kerja produktif. Populasi usia tenaga kerja produktif menurun antara tahun 2000 – 2016 kurang lebih 10 juta, berawal dari angka 86,6 juta jiwa menjadi 76,7 juta jiwa. Meskipun terjadi penurunan yang cukup drastis terhadap populasi usia tenaga kerja produktif,

tetapi populasi angkatan kerja Jepang tetap dalam kondisi yang relatif stabil, hanya berkurang kurang lebih 1,1 juta, dari angka 67,7 juta jiwa menjadi 66,7 juta jiwa. Menariknya, populasi angkatan kerja mengalami kenaikan dari tahun 2012 – 2016 (Mori dan Kawaguchi, 2017: 2). Seperti grafik di bawah ini.

Grafik 2.3 *Populasi Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja*

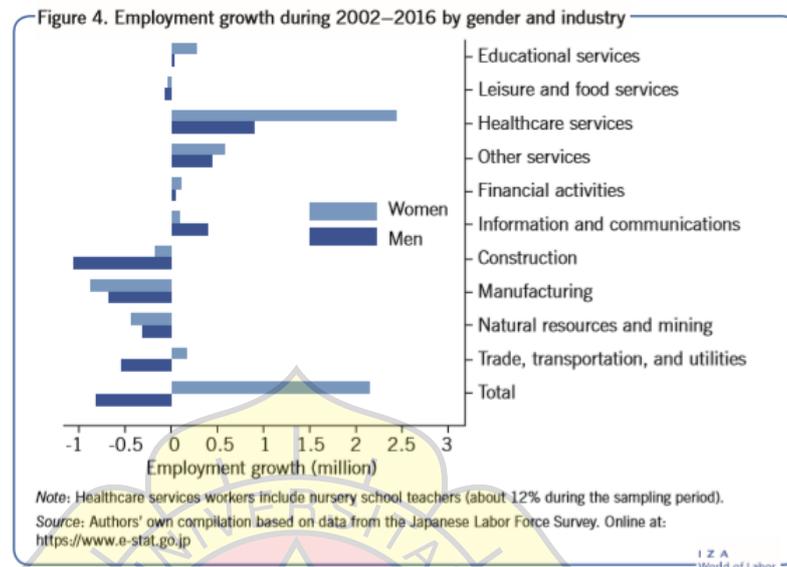


Sumber: <http://www.e-stat.go.jp>

Meskipun Jepang mengalami penurunan terhadap populasi usia tenaga kerja produktif, disisi lain Jepang mengalami peningkatan pada pertumbuhan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan lapangan pekerjaan yang paling mencolok ialah pada industri layanan kesehatan. Dengan tumbuh cepatnya populasi lansia tampaknya menjadi pendorong utama dalam meningkatnya lapangan pekerjaan dalam industri layanan kesehatan. Oleh sebab itu, populasi yang menua mungkin memiliki pengaruh yang besar terhadap pasokan tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Sektor kesehatan di Jepang memiliki persamaan seperti negara lain pada umumnya, dimana cenderung mempekerjakan tenaga kerja perempuan dibandingkan tenaga kerja laki-laki. Akibatnya, jumlah populasi tenaga kerja perempuan dalam industri layanan kesehatan meningkat sekitar 2,5 juta orang, sekitar 21,6% tenaga kerja perempuan dipekerjakan di industri layanan kesehatan (Mori dan Kawaguchi, 2017: 5). Seperti grafik di bawah ini, dimana industri

yang paling banyak mempekerjakan tenaga kerja perempuan ialah industri layanan kesehatan.

Grafik 2.4. *Pertumbuhan Lapangan Kerja periode 2002 – 2016*



Sumber: <http://www.e-stat.go.jp>

Dengan populasi tenaga kerja yang mengalami penurunan setiap tahunnya, pemerintah menerapkan reformasi kebijakan berupa sistem asuransi kesehatan untuk mengatasi besarnya permintaan tenaga kerja khususnya pada sektor layanan kesehatan. Salah satunya pada tahun 2000 ialah diterapkannya sistem asuransi perawatan jangka panjang (Mori dan Kawaguchi, 2017).

2.3.1 Tenaga Kerja Asing di Jepang

Seperti pada grafik bab sebelumnya, menjelaskan bahwa pada sektor konstruksi, manufaktur, maupun transportasi jumlah tenaga kerja berada di posisi yang rendah. Meskipun jumlah tenaga kerja pada sektor tersebut rendah, tetapi seiring dengan semakin majunya negara Jepang, teknologi maupun pembangunan negarapun akan semakin maju. Sehingga tiga sektor tersebut membuka lapangan pekerjaan dalam skala yang besar. Namun, karena Jepang tidak bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada tiga sektor

tersebut, pemerintah membuka kebijakan migrasi bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Jepang dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada tiga sektor tersebut. Dengan adanya kebijakan migrasi ini berpotensi dengan masuknya penduduk asing ke Jepang.

Kebijakan migrasi bagi Jepang merupakan hal yang masih sangat dipertimbangkan, karena di sisi lain sebagaimana pemerintahan Jepang saat di bawah kepemimpinan PM Shinzo Abe yang secara resmi masih enggan dalam menerapkan kebijakan migrasi bagi tenaga kerja asing, karena mempertahankan prinsip "*no-immigration*". Hal tersebut berkaitan dengan tingkat homogenitas yang tinggi pada masyarakat Jepang, masyarakat Jepang memiliki tingkat persatuan yang kuat, sehingga kedatangan masyarakat asing dalam jumlah yang besar dikhawatirkan akan merusak tatanan sosial serta keharmonisan masyarakat Jepang yang telah terjaga sejak lama, dan dikhawatirkan dapat meningkatkan tingkat kejahatan oleh masyarakat asing. Meski secara ekonomi, Jepang sangat membutuhkan tenaga kerja asing tersebut, tetapi pemerintah Jepang masih sangat berhati-hati dalam menjalankan kebijakan migrasi bagi masyarakat asing (Jack, 2016: 15).

Pada akhir tahun 2013 berdasarkan data pemerintahan Jepang, jumlah penduduk asing yang tinggal di Jepang tercatat sebanyak 2.437.000 jiwa, dari jumlah total penduduk asing di Jepang, sebagian besar atau sebanyak 648.980 jiwa berasal dari Tiongkok, sementara itu di posisi kedua ditempati oleh Korea dengan jumlah 519.737 jiwa, dari jumlah penduduk asing tersebut, 717.504 jiwa adalah tenaga kerja (Kodama, 2015: 3).

Dengan masuknya tenaga kerja asing di Jepang, akan lebih mudah mendorong proses penurunan populasi tenaga kerja produktif Jepang, karena tidak menutup kemungkinan pihak asing dalam mengambil alih pada perusahaan-perusahaan Jepang yang dapat berdampak pada tersingkirnya tenaga kerja Jepang, selain itu terkait dengan masuknya tenaga kerja asing dapat menggoyahkan keharmonisan masyarakat Jepang seperti pemaparan di atas. Oleh karena itu, hal tersebut harus menjadi pertimbangan tersendiri

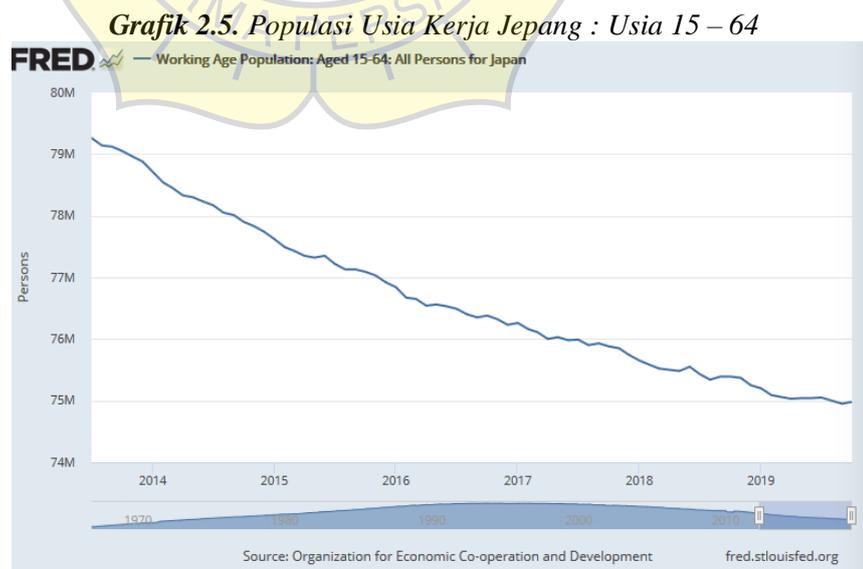
bagi pemerintah Jepang dalam membuka kebijakan migrasi bagi tenaga kerja asing.

2.4 Gambaran Umum mengenai Penurunan Populasi Tenaga Kerja Usia Produktif Tahun 2014 – 2019

Fenomena penurunan populasi tenaga kerja khususnya usia produktif yaitu dengan rentang usia 15 – 64 tahun, di Jepang merupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Selama beberapa tahun, fenomena ini sudah menjadi permasalahan bagi Jepang di kalangan masyarakat umum, sudah banyak media baik itu media cetak ataupun media berbasis online yang membahas tentang fenomena ini. Dan menurut para ahli, fenomena ini akan terus berlanjut hingga berpuluh-puluh tahun yang akan datang.

Selama lima tahun terakhir ini sekitar tahun 2014 sampai 2019, penurunan populasi tenaga kerja usia produktif di Jepang masih terus mengalami penurunan yang cukup drastis.

Seperti pada *Organization for Economic Co-operation and Development*, dijelaskan bahwa jumlah populasi tenaga kerja usia produktif Jepang selama lima tahun terakhir dalam kondisi yang terus menurun, seperti grafik di bawah ini.



Sumber: <https://fred.stlouisfed.org/>

Pada Grafik di atas menunjukkan bahwa setiap tahun sejak 2014 – 2019, populasi tenaga kerja usia produktif terus mengalami penurunan. Dimulai dari tahun 2014 dengan jumlah 77,7 juta jiwa, kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2015 sebesar 0,82% menjadi 76,9 juta jiwa, mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 sebesar 0,69% menjadi 76,2 juta jiwa, pada tahun 2017 mengalami penurunan yang tidak begitu besar skalanya yaitu sebesar 0,38% menjadi 75,8 juta jiwa, kemudian pada tahun 2018 penurunan kembali drastis dengan presentase 0,6% menjadi 75,2 juta jiwa, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali namun tidak begitu besar yaitu pada presentase 0,27% menjadi 74,9 juta jiwa.

Penurunan populasi tenaga kerja usia produktif Jepang terjadi karena berbagai faktor, selain tingkat kelahiran yang rendah serta tingkat kematian yang tinggi, tingkat bunuh diri yang tinggi juga merupakan salah satu faktor terhadap fenomena tersebut. Jepang merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bunuh diri yang tinggi.

Budaya bunuh diri merupakan budaya terhormat bagi Jepang, budaya ini sudah dilestarikan sejak zaman feodal, dimana kematian dengan cara bunuh diri merupakan cara yang paling terhormat bagi mereka seperti para samurai pada zaman dahulu yang mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri menggunakan pedang mereka, ataupun para pejabat yang memilih mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri karena merasa tidak bisa mengemban amanah serta tanggung jawab yang baik sebagai seorang pemimpin. Namun, tren bunuh diri tersebut masih dilakukan sampai saat ini meskipun dilakukan dengan alasan yang berbeda.

Selama lima tahun terakhir, sejak 2014 terjadi penurunan terhadap kasus kematian karena bunuh diri menjadi sekitar 25.427 kasus, berdasarkan data statistik Badan Kepolisian Nasional Jepang. Angka kematian ini menurun sekitar 6,8% dari sebelumnya, atau dapat dikatakan dengan jumlah yang paling sedikit sejak tahun 1997, dimana saat itu angka bunuh diri melonjak tajam hingga 30.000 kasus lebih, dan saat itu angka bunuh diri

sangat tinggi karena diakibatkan dengan runtuhnya perekonomian dunia, salah satunya Jepang pada tahun 1990-an. Meskipun selama lima tahun terakhir tingkat bunuh diri Jepang mengalami penurunan, namun demikian tren bunuh diri ini masih merupakan penyebab utama kasus kematian di Jepang, yang juga merupakan penyebab menurunnya populasi tenaga kerja usia produktif (Badan Kepolisian Nasional Jepang dalam Trahutami, 2017: (Vol 1) : 3).

2.4.1 Beberapa Lapangan Pekerjaan yang Mengalami Kekurangan Tenaga Kerja

Di sisi lain, beberapa tahun terakhir ini Jepang sedang membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk para tenaga kerja asing. Beberapa sektor bidang pekerjaan sedang membutuhkan tenaga kerja dalam skala yang cukup besar, yaitu bidang kesehatan, industri, pariwisata, dsb.

Dengan bertambahnya jumlah populasi usia menua, sehingga semakin banyak pula jumlah lansia. Oleh sebab itu, sektor bidang kesehatan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak setiap tahunnya, baik itu sebagai perawat ataupun sebagai *careworker* yang ditugaskan di rumah sakit maupun di panti jompo. Pada zaman modern ini, pemuda Jepang sendiri hanya sedikit yang berminat untuk bekerja dalam bidang kesehatan, karena bagi mereka banyak profesi lainnya yang bisa menghasilkan penghasilan atau gaji yang lebih besar. Dengan demikian, dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam sektor ini, pemerintah Jepang membuka lapangan pekerjaan besar-besaran bagi tenaga kerja asing pada sektor ini. Salah satu cara pemerintah Jepang dalam mengatasi kebutuhan tenaga kerja dalam skala yang besar pada sektor ini, yaitu dengan melakukan kerja sama dengan beberapa negara di Asia, salah satunya Indonesia. Kerja sama yang dijalin yaitu dalam bentuk kerja sama *IJ-EPA* (*Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement*) yaitu suatu lembaga yang bekerja dalam bidang ekonomi, namun juga lembaga penyalur tenaga

kerja medis (Aminah, Wardoyo & Pangastoeti, 2018: 94-95). Dengan adanya kerja sama dalam bentuk tersebut, diharapkan Indonesia dan Japan dapat saling memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

Dalam bidang manufaktur dan industri, pemerintah Jepang mendatangkan tenaga kerja asing guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada sektor tersebut. Pemerintah Jepang membuka peluang bagi tenaga kerja asing dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja asing, salah satunya *PT JIAEC (Japan Indonesia Association for Economy Cooperation)* yaitu suatu lembaga yang menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke Jepang guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam bidang industri maupun manufaktur.

Di sisi lain, pada bidang pariwisata pemerintah Jepang menyadari bahwa pariwisata menjadi industri yang sangat berpotensi dalam menyumbang devisa negara, oleh sebab itu pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan dan program baru dalam menekan kontribusi pariwisata. Oleh sebab itu beberapa lapangan pekerjaan pada sektor ini dibuka, baik itu sebagai *tour guide* ataupun lainnya. Mengingat tahun 2020 akan diadakan Olimpiade Tokyo 2020 atau *2020 Summer Olympics* di Jepang, maka kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat, khususnya untuk tahun 2019 ini. Dengan kurangnya populasi tenaga kerja usia produktif di Jepang, maka dalam penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020 ini, pada desember tahun 2018 silam pemerintah Jepang membuka kesempatan bagi tenaga kerja asing untuk ikut berpartisipasi dalam acara tersebut, baik itu sebagai *volunteer, event crew*, dsb.

Berubahnya struktur demografi juga memberikan dampak yang kurang baik baik sektor pertanian di Jepang, karena dengan semakin rendahnya jumlah tenaga kerja usia muda dan semakin rendahnya pula tingkat minat para tenaga kerja usia muda pada sektor pertanian mengakibatkan sektor ini mengalami kekurangan tenaga kerja. Sehingga dalam menangani beberapa permasalahan tersebut, pemerintah Jepang memperbaharui sistem pengelolaan pertanian Jepang dengan menggunakan

teknologi yang lebih canggih tanpa bantuan sumber daya manusia (Susilowati, 2016: 36)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada bab selanjutnya penulis akan membahas mengenai faktor-faktor pendukung terhadap fenomena krisis tenaga kerja produktif di Jepang tahun 2014 – 2019, serta upaya pemerintah Jepang dalam menangani fenomena tersebut.

2.5 Penelitian Relevan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama, oleh sebab itu penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan terhadap penelitian ini yaitu:

1. Penelitian karya Tiaayu Sulistyana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2019 dengan judul “Krisis Tenaga Kerja di Jepang” dalam penelitian karya Tiaayu Sulistyana mengenai Krisis Tenaga di Jepang membahas kondisi ekonomi Jepang pada zaman meiji yang kemudian menjadi suatu pemicu terhadap terjadinya kekurangan tenaga kerja pada saat ini.
2. Jurnal karya Katherine Ziomek, Wilfrid Laurier University, Canada, tahun 2017 dengan judul “A Country in Crisis: The Changing Demographics of Japan” (Volume 4) dalam jurnal karya Katherine Ziomek mengenai krisis perubahan demografi Jepang saat ini, termasuk pada rendahnya kelahiran serta tingginya angka harapan hidup yang merupakan hasil dari penuaan populasi, kemudian beberapa solusi yang diberikan dalam mengatasi hal tersebut yang salah satunya adalah, kebijakan imigrasi.
3. Hasil karya ilmiah dari David Green dan Yoshihiko Kadoya, tahun 2013 dengan judul “English as a gateway? Immigration and public opinion in Japan, discussion paper (No.883), The Institute of Social and Economic Research (ISER), Osaka University. Karya ilmiah ini membahas mengenai peningkatan imigrasi merupakan satu solusi terbaik bagi Jepang dalam menangani permasalahan demografi.